



**DINAS PERTANIAN,  
KETAHANAN PANGAN DAN  
PERIKANAN**

**LKIP**

**LAPORAN KINERJA INSTANSI  
PEMERINTAH**

**TAHUN 2024**

Jl. Sukapura VI Bojongkoneng Singaparna  
Telp (0265) 330163 Faksimile (0265) 330163  
Email: [dpkpp@tasikmalayakab.go.id](mailto:dpkpp@tasikmalayakab.go.id)

Singaparna 46415

## KATA PENGANTAR

Memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Tahun 2024 telah dapat kami susun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama Tahun Anggaran 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, saran dan pendapat kami harapkan demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan pada tahun berikutnya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan laporan ini, kami ucapkan terima kasih.

Singaparna, Desember 2024

**KEPALA DINAS PERTANIAN,  
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA**



**TATANG WAHYUDIN, S.P., M.P**

Pembina Tingkat I

NIP. 19700415 199903 1 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi .....	1
1.2. Struktur Organisasi .....	5
1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana.....	6
1.3.1. Kekuatan Sumber Daya Pegawai.....	6
1.3.2. Sumber Daya Unit Operasional Teknis.....	8
1.3.3. Sarana Prasarana.....	11
1.4. Isu Aktual.....	14
1.5. Sistematika Penyusunan .....	15
<b>BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>17</b>
2.1. Rencana Strategis .....	17
2.1.1. Visi dan Misi .....	18
2.1.2. Perjanjian Kinerja .....	19
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>34</b>
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	34
3.1.1. Indikator Capaian Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024.....	34
3.1.2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan .....	42
3.1.3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya.....	44
3.1.4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.....	46
3.1.5. Realisasi Anggaran.....	51

## **BAB IV. KESIMPULAN**

4.1. Tinjauan Umum.....	70
4.2. Permasalahan dan Solusi .....	70
4.2.1. Permasalahan .....	70
4.2.2. Solusi .....	72

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Kedudukan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 59 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai Tugas Pokok: “ **Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pertanian, bidang tanaman pangan, bidang kebun dan horti, bidang peternakan dan kesehatan hewan, bidang ketahanan pangan, bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan.**”.

Dengan menyelenggarakan tugasnya, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan bahan kebijakan di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil, perbibitan dan produksi peternakan serta penyuluhan dan sarana prasarana pertanian serta bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan.
- b. Penyelenggaraan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Penyelenggaraan pengembangan sarana pertanian, pangan dan perikanan;
- d. Penyelenggaraan pengawasan mutu, peredaran dan
- e. pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- f. Penyelenggaraan pengawasan penggunaan sarana pertanian;

- g. Penyelenggaraan pembinaan produksi di bidang pertanian dan perikanan;
- h. Penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- i. pelaksanaan kebijakan bidang ketahanan pangan dan bidang kelautan dan perikanan
- j. Penyelenggaraan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- k. Penyelenggaraan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, pangan dan perikanan;
- l. Penyelenggaraan pelaksanaan penyuluhan pertanian, pangan dan perikanan;
- m. Penyelenggaraan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian, pangan dan perikanan;
- n. Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian, pangan dan perikanan;
- o. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- p. Pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- q. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi dinas;
- r. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan Unit Pelaksana Teknis.

Susunan organisasi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

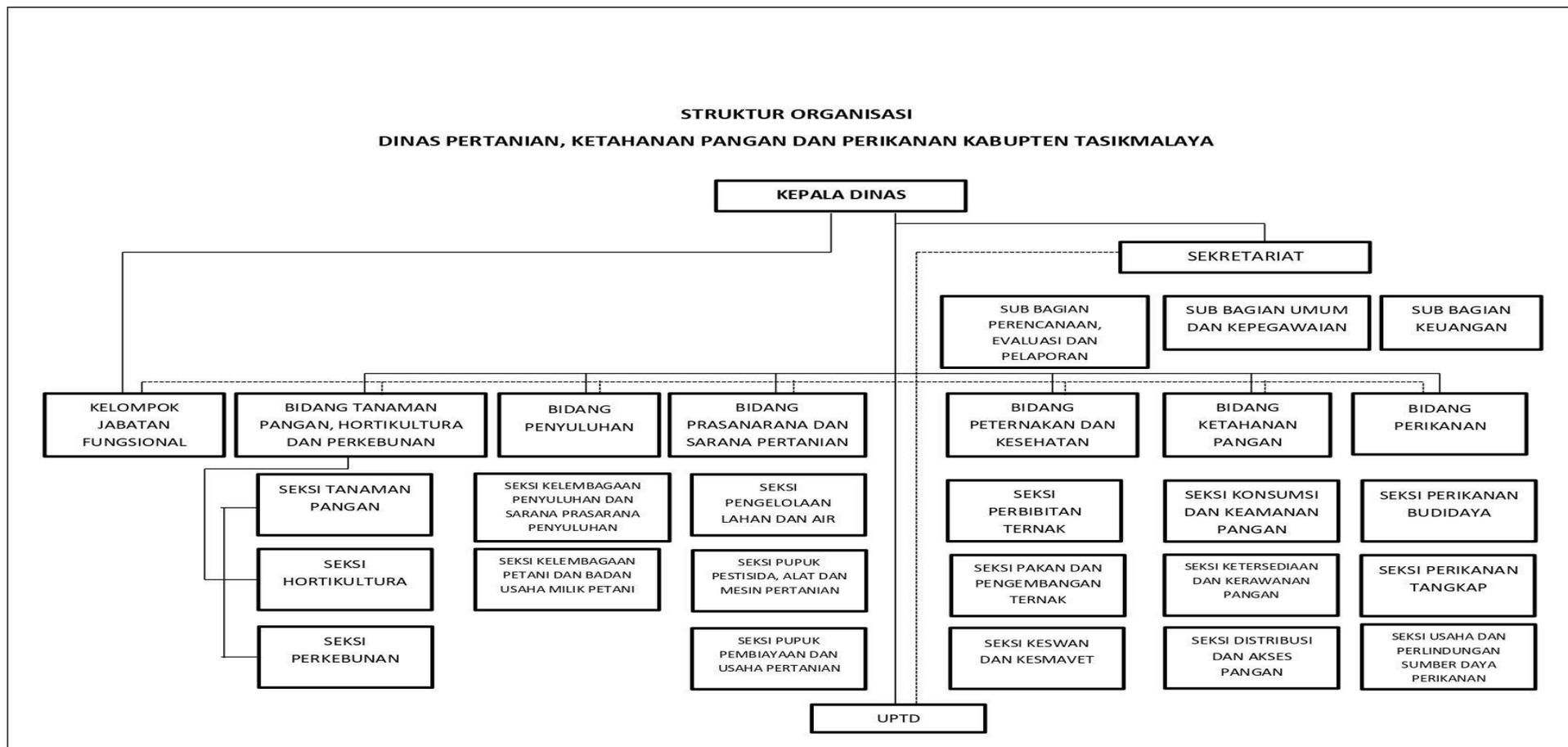
- Kepala Dinas;
- Sekretariat, terdiri atas:
  1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan terdiri atas:
    1. Seksi Tanaman Pangan;
    2. Seksi Hortikultura; dan
    3. Seksi Perkebunan.
  - Bidang Penyuluhan, terdiri atas:
    1. Seksi Kelembagaan Penyuluhan dan Sarana Prasarana Penyuluhan;
    2. Seksi Kelembagaan Petani dan Badan Usaha Milik Petani;
  - Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas:
    1. Seksi Perbibitan Ternak
    2. Seksi Pakan dan Pengembangan Peternakan; dan
    3. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - Bidang Sarana Prasarana Pertanian, terdiri atas:
    1. Seksi Pengelolaan Lahan Dan Air;
    2. Seksi Alat Mesin dan Sarana Produksi; dan
    3. Seksi Pembiayaan dan Usaha Pertanian;
  - Bidang Ketahanan Pangan, terdiri atas:
    1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
    2. Seksi Distribusi dan Akses Pangan; Dan
    3. Seksi Konsumsi dan Keamanan Pangan.
  - Bidang Perikanan, terdiri atas:
    1. Seksi Perikanan Budidaya;
    2. Seksi Perikanan Tangkap; dan
    3. Seksi Usaha dan Perlindungan Sumber Daya Perikanan.
  - Kelompok Jabatan Fungsional

- Unit Pelaksana Teknis Daerah

Adapun bagan struktur organisasi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut :

## 1.2. Struktur Organisasi



### 1.3. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana

#### 1.3.1. Kekuatan Sumber Daya Pegawai

Jumlah pegawai definitif ada 253 orang, meliputi 105 pegawai struktural dan 148 tenaga fungsional. Jumlah pegawai selengkapnya berdasarkan eselon adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1. Keadaan Pegawai Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan**

No.	Deskripsi	Rincian	Jumlah (Orang)
1.	Golongan	Golongan I	-
		Golongan II	47
		Golongan III	151
		Golongan IV	55
2.	Pendidikan	SD	-
		SMP	-
		SMA	89
		D1	2
		D3	14
		D4	36
		S1	69
		S2	43
		S3	-
3.	Eselon	II	1
		III	7
		IV	45

Sedangkan keadaan pegawai berdasarkan pendidikan adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2 Keadaan Pegawai berdasarkan Pendidikan**

NO	Jumlah Total Personil (org)	Jumlah Personil (org) berdasarkan Kualifikasi Pendidikan		Jumlah Personil (org) Berdasarkan Pangkat		Jumlah Personil (org) Berdasarkan Golongan		Jumlah Pejabat	
		3	4	5	6	7	8	9	10
1	253	SD	-	Juru Muda	-	1/a	-	Struktural 47	Penyuluh 126
		SLTP	-	Juru Muda Tk.I	-	1/b	-	Pelaksana 58	Medik veteriner 4
		SLTA	89	Juru	-	1/c	-		Pengawas Mutu Pakan 8
		D.I	2	Juru Tk.I	-	1/d	-		Pengawas Bibit Ternak 6
		D.III	14	Pengatur Muda	13	II/a	13		Paramedik Veteriner 4
		D.IV	36	Pengatur Muda Tk.I	5	II/b	5		
		S.1	69	Pengatur	22	II/c	22		
		S.2	43	Pengatur Tk.I	7	II/d	7		
		S.3	-	Penata Muda	50	III/a	50		

				Penata Muda Tk.I	27	III/b	27		
				Penata	31	III/c	31		
				Penata Tk.I	43	III/d	43		
				Pembina	19	IV/a	19		
				Pembina Tk.I	29	IV/b	29		
				Pembina Utama Muda	7	IV/c	7		

No	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pejabat Struktural	47	
2	Pejabat Fungsional		
	a. Fungsional Penyuluh	126	
	b. Medik Veteriner	4	
	c. Pengawas Mutu Pakan	8	
	d. Pengawas Bibit Ternak	6	
	e. Paramedik Veteriner	4	
3	Pelaksana	58	
	Jumlah	253	

### 1.3.2. Sumber Daya Unit Operasional Teknis

Dalam menjalankan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perangkat Daerah dan Perbup Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Dinas Daerah Kabupaten Tasikmalaya dilengkapi Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagai berikut :

**Tabel 1.3. UPT Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan**

No	UPT	Keterangan
1	Balai Benih Pertanian, Perkebunan dan Hortikultura	UPT penyedia benih unggul padi palawija (Mangunreja), UPT penyedia benih hortikultura dan perkebunan ( Cimintar Cipatujah)
2	Perbibitan Ternak	UPT Sapi Potong Tawang dan UPT Kambing PE Malaganti (Penyediaan Bibit Sapi Potong dan Kambing Perah; Kemitraan Usaha Sapi Potong dan Kambing Perah
3	Rumah Potong Hewan (RPH)	RPH Manonjaya, RPH Singaparna dan RPH Ciawi (Pelayanan fasilitas pemotongan hewan ternak besar (sapi dan kerbau)
4	Puskesmas	Wilayah I,II,III
5	Laboratorium Veteriner	Kabupaten
6	Pasar Hewan	Pasar Hewan Manonjaya, Pasar Hewan Padakembang, Pasar Hewan Ciawi, Pasar Hewan Pancatengah (Pelayanan fasilitas perdagangan hewan

		ternak besar dan kecil (Sapi, Kerbau, Kambing dan domba)
7	Wilayah Pertanian	Taraju, Singaparna, Ciawi, Cikatomas, Manonjaya, Sukaraja, Karangnunggal
8	Balai Benih Ikan	BBI Rancapaku, BBI Padakembang
9	Pasar Ikan	Pasar Ikan Jatihurip, Pasar Ikan Singaparna, dan Pasar Ikan Padakembang

Di samping unit operasional teknis dibawah UPT tersebut diatas, terdapat unit operasional teknis yang juga melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat. Unit-unit tersebut adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.4. Unit Operasional Teknis lainnya**

No	Unit Teknis	Instalasi	Fungsi Pelayanan Utama
1.	Pos Inseminasi Buatan (IB)	Cikalong, Cibalong, Jatiwaras, Karangnunggal, Sukaraja, Bantarkalong	- Pelayanan Inseminasi Buatan (IB) untuk sapi potong
2.	Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas)	Cikatomas, Karangnunggal, Pagerageung	- Pelayanan Pemeriksaan dan

			Pengobatan Penyakit Hewan
--	--	--	---------------------------

Sarana Prasarana yang dimiliki berupa Gedung Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, Bangunan UPT Balai Benih Padi dan Palawija, Balai Benih Hortikultura dan Perkebunan, Bangunan Instalasi UPT Sapi Potong Tawang dan UPT Kambing PE Malaganti, RPH Manonjaya, RPH Singaparna dan RPH Ciawi, Puskesmas Wilayah I,II,III, Laboratorium Veteriner, Pasar Hewan Manonjaya, Pasar Hewan Padakembang, Pasar Hewan Ciawi, Pasar Hewan Pancatengah dan 39 BP3K di 39 Kecamatan.

### 1.3.3. Sarana Prasarana

**Tabel 1.5. Sarana Prasarana**

No.	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Gedung Kantor	130	
	Ruang Kepala	1	
	Ruang Rapat Pimpinan	1	
	Aula	1	
	Ruang Sekretaris	1	
	Ruang Kasubag	3	
	Ruang Kepala Bidang	6	
	Ruang Kepala Seksi	18	
	Ruang Pelayanan (front office)	1	
	Ruang Pengolahan (back office)	0	
	Ruang Penerbitan	0	
	Ruang Arsip	1	

	Ruang Tunggu	1	
<b>No.</b>	<b>Uraian</b>	<b>-</b>	<b>Ket</b>
	Loket Pembayaran	-	
	Loket Informasi & Pengaduan	-	
	Ruang Rokok	1	
	Ruang Laktasi	-	
	Ruang Satpak	1	
	Ruang Serbaguna	-	
	Ruang Baca dan Bermain Anak	-	
	Musholla	1	
	Pantry	-	
	Kamar Mandi/WC	8	
2.	Kendaraan Roda 4	22	
3.	Kendaraan Roda 2	312	
4.	Komputer/PC	46	
5.	Laptop	24	
6.	Printer	32	
7.	Server	1	
8.	Telephone	1	
9.	Faximili	1	
10.	Infocus	5	
11.	Layar Infocus	2	
12.	Internet	6	
	Jaringan Speedy 100 Mbs	-	
13.	Sistem Informasi Manajemen Pelayanan :		
	E-mail	1	

	<a href="mailto:dpkpp@tasikmalayakab.go.id">dpkpp@tasikmalayakab.go.id</a>		
	Local Area Network Sistem Informasi Manajemen Perizinan (SIM Perizinan)	1	
14.	Tablet	-	
15.	Mesin Penghancur Kertas	12	
16.	Scanner	10	
17.	Digital Kamera	6	
18.	Televisi	2	
19.	USB Adapter	-	
20.	Handphone	-	
21.	Standing Bracket	-	
22.	CCTV	-	
23.	Pendingin Ruangan	20	
24.	Tabung Pemadam Kebakaran	-	
25.	Kursi Tunggu Tamu	14	
26.	Kursi Sofa	14	
No.	Uraian	-	Ket
27.	Meja Kerja	88	
28.	Meja Pelayanan	2	
29.	Kursi Kerja	67	
30.	Lemari Kayu	16	
31.	Lemari Besi	34	
32.	Rak Arsip	7	
33.	Brankas	1	
34.	Perosotan Anak	-	

35.	Kursi Sofa Baca	-	
36.	Rak Buku Minimalis	-	
37.	Meja Popok Laktasi	-	
38.	Lemari Es Laktasi	-	

#### 1.4. Isu Aktual

Isu aktual yang berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Status, luas kepemilikan dan alih fungsi lahan
  2. Keterbatasan prasarana dan sarana pertanian
  3. Rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia pertanian dan kelembagaan pertanian
  4. Keterbatasan akses petani terhadap lembaga permodalan
  5. Belum optimalnya koordinasi instansi terkait dalam menunjang pembangunan sektor pertanian
  6. Dampak Perubahan iklim (DPI)
  7. Masih rendahnya daya saing kompetitif dan komparatif
  8. Masih tingginya penggunaan pupuk dan pestisida an organik
  9. Optimalisasi fungsi lahan pangangan sesuai UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  10. Pengembangan Kawasan Peternakan yang terintegrasi
  11. Penyediaan bibit dan pengembangan sumberdaya genetik lokal
  12. Perluasan areal HMT/HPT dan penyediaan pakan berkualitas
  13. Peningkatan daya saing, nilai tambah dan kualitas produk peternakan;
  14. Pengendalian Kesehatan Hewan
  15. Penerapan kesehatan hewan, kesmavet dan kesejahteraan hewan.
- Kerusakan lingkungan terutama berkaitan dengan perubahan

iklim, yang sangat erat hubungannya dengan pengelolaan hutan dan sumberdaya lahan, selain dampak yang lainnya seperti banjir, kekeringan dan erosi;

16. Terjadinya degradasi fungsi lahan yang menyebabkan munculnya lahan-lahan potensial kritis;
17. Rendahnya tingkat produksi dan produktifitas budidaya tanaman perkebunan, yang dikhawatirkan akan mendorong terjadinya alih fungsi lahan dan tanaman;
18. Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan;
19. Belum optimalnya pemanfaatan lahan perkebunan, sehingga mengakibatkan pendapatan petani rendah;
20. Diversifikasi usaha perkebunan belum dilaksanakan dengan baik dan terintegrasi usaha budidaya pertanian lainnya;
21. Kelembagaan petani usaha perkebunan belum tertata dengan baik.

### **1.5. Sistematika Penyusunan**

Sistematika penyajian LAKIP Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	Pada bagian ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan usatama (strategis issue) yang sedang dihadapi oleh organisasi.
BAB II	Perencanaan Kinerja

	Diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kenierja tahun yang bersangkutan
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
	Disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi dan untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis kinerja, serta realisasi anggaran
BAB IV.	PENUTUP
	Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi
LAMPIRAN	Formulir Renstra Perjanjian Kinerja Formulir Rencana Kerja Tahunan Lampiran Pengukuran Kinerja Lain-lain yang dianggap perlu

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis**

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berisi visi, misi, nilai-nilai, tujuan dan strategi yang disusun sesuai sistematika paket pedoman reformasi dibidang perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan mempertimbangkan aspek-aspek internal dan eksternal yang mempengaruhi dan mungkin akan mempengaruhi keberhasilan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 disusun untuk mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program pembangunan daerah yang berisi program-program prioritas terpilih untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Daerah terpilih. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026. Rencana Strategis perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Bappeda Kabupaten Tasikmalaya.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya disusun atas dasar kebutuhan organisasi untuk mengantisipasi dinamika pembangunan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Oleh karena itu, Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya

---

diharapkan dapat mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang sehingga ada pengakuan (*recognized*) dan respon dari pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

### **2.1.1. Visi dan Misi**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada 9 Desember 2020. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, maka Visi yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026, penjabaran makna dari Visi Kabupaten Tasikmalaya yaitu: ***“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”***.

Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026, Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah;
2. Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih, dan professional;
3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata; dan

4. Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan wilayah, dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan kerjasama skala Lokal, Nasional, Regional, dan Global.

### **2.1.2. Perjanjian Kinerja**

Pernyataan Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/perjanjian kinerja yang sangat penting antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki instansi. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*Outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahun. Dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan dengan pernyataan perjanjian kinerja diharapkan dalam mengelola program atau kegiatan akan lebih terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya memiliki sasaran strategis meningkatkan ketahanan pangan, produksi pertanian dan perikanan yang meliputi hasil produksi komoditas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, hasil peternakan, perikanan serta sarana pendukung pertanian. **Sasaran, Program dan Kegiatan** yang dilaksanakan pada Tahun 2024 dengan mengacu kepada Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, Sasaran dalam Rencana Kinerja Tahunan disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan.

---

Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Pencapaian sasaran dan program secara terpadu dan menyeluruh maka ditetapkan rencana kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya yang dijabarkan melalui beberapa Program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, Program Penyuluhan Pertanian.

Perjanjian kinerja awal merupakan lampiran/dokumen LKIP ini, sedangkan perjanjian kinerja perubahan menjadi komponen penting pengukuran kinerja. Adapun Perjanjian kinerja perubahan sebagai berikut :



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA  
TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : TATANG WAHYUDIN, S.P, M.P.  
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan  
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : ADE SUGIANTO  
Jabatan : Bupati Tasikmalaya  
selaku Atasan Langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

**Pihak Pertama** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**Pihak Kedua** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Singaparna, 24 Januari 2024

Pihak Kedua

**ADE SUGIANTO**

Pihak Pertama

**TATANG WAHYUDIN, S.P, M.P.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700415 199903 1 006

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

SASARAN		TARGET	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA			
1	Meningkatnya penyuluhan pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	55,82	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
2	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Persentase Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1,06 %	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
3	Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP) Komoditas Pertanian	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) Komoditas Pertanian dari tahun sebelumnya	300 Point/ Nilai	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
4	Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan yang ASUH	Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan yang ASUH	1,30 %	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
5	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase rata-rata ketersediaan energi dan protein dalam bahan pangan per kapita	3,20 %	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
6	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Produksi Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap	4,00 %	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan dan Akuntabilitas Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	Nilai AKIP Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	70,85 Point/ Nilai	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	500.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	265.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.893.100.000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	250.000.000	

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.362.460.119	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.261.300.000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	25.782.341.000	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.521.850.000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.263.934.000	

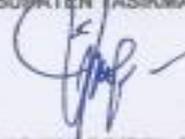
BUPATI TASIKMALAYA



ADE SUGIANTO

Singaparna, 24 Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN,  
KETAHANAN PANGAN DAN  
PERIKANAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA



TATANG WAHYUDIN, S.P., M.P.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700415 199903 1 006

Lampiran :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN TASIKMALAYA**

PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	500.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	265.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.893.100.000	
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	250.000.000	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	32.362.460.119	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.261.300.000	
PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	25.762.341.000	
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.521.860.000	
PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.263.934.000	

BUPATI TASIKMALAYA



**ADE SUGIANTO**

Singaparna, 24 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERTANIAN,  
KETAHANAN PANGAN DAN  
PERIKANAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA**



**TATANG WAHYUDIN, S.P. M.P.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19700415 199903 1 006

Perjanjian kinerja yang dibuat merupakan pernyataan perjanjian untuk mendukung visi yang ingin diwujudkan pemerintah daerah yaitu ***“DENGAN SEMANGAT GOTONG ROYONG, MEWUJUDKAN KABUPATEN TASIKMALAYA YANG RELIGIUS/ISLAMI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA”***

yang diimplementasikan ke dalam misi ke 3 yaitu *“Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata”* dalam mewujudkan tujuan khususnya pembangunan pertanian. Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar- besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Demikian, Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat diuraikan secara spesifik mengenai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Kebijakan</b>
Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah	1.Meningkatnya penyuluhan pertanian	1. Mengoptimalkan pembinaan, penyuluhan dan peningkatan keterampilan dan wawasan pelaku usaha pertanian;	1. Pembinaan, penyuluhan dan peningkatan keterampilan dan wawasan pelaku usaha pertanian;
	2. Meningkatkan rata-rata	1. Menerapkan budidaya yang baik dan benar sesuai	2. Pemanfaatan teknologi pertanian

Produksi Tanama Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	dengan good agriculture practices (GAP) serta meningkatkan penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati;	yang ramah lingkungan;
	2. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya lahan perkebunan untuk meningkatkan produksi dan produktifitasnya;	3. Peningkatan produksi dan produktifitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui penerapan teknologi tepat guna dan diversifikasi usaha serta sinergitas perencanaan didukung data dan informasi yang berkualitas;
	3. Mempertahankan dan menggantikan luas baku lahan sawah yang beralih fungsi lahan dari pertanian ke nonpertanian serta mengoptimalkan pemanfaatan sarana	4. Penerapan regulasi Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

		dan prasarana pertanian;	
3. Meningkatnya Produksi Pternakan Yang ASUH	1. Mengoptimalkan Pengembangan Pternakan Berbasis kawasan yang terintegrasi dengan arah kebijakan;		1. Peningkatan populasi Ternak Lokal dengan mesntimulasi usaha budidaya ternak di masyarakat
	2. Mengoptimalkan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan zoonosis		2. Peningkatan Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menulat strategis dan zoonosis
4. Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi budidaya dan penangkapan ikan.		1. Mengembangkan dan merevitalisasi unit pembenihan serta mengoptimalkan pemberdayaan nelayan tangkap laut dan perairan umum.
5. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dari aspek	1. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Pangan lokal”, dengan arah kebijakan		1. Mengembangkan dan merevitalisasi kelembagaan pangan masyarakat serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan

Ketersediaan dan Konsumsi	pekarangan menjadi sumber produksi pangan.
---------------------------	--

Perwujudan tujuan dan sasaran tersebut dibantu melalui instrumen dalam Pengelolaan Kinerja melalui Pemantapan manajemen pembangunan berbasis kinerja yang menjadi salah satu perhatian Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan. Beberapa instrumen yang sudah diikuti untuk peningkatan kinerja pada fase perencanaan.

**Tabel 2.2 Kesesuaian Sasaran Strategis dan Program  
DPKPP Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program Yang Mendukung	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran
					(Rp)	(Rp)
1	Meningkatnya Penyuluhan Pertanian	Cakupan Bina Kelompok Tani	55,82	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.953.134.000	3.784.389.766
2	Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	Persentase Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan	1,06	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.241.582.653	1.168.071.747
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	28.579.976.658	24.981988.807
3	Meningkatnya Produksi Peternakan	Prosentase Peningkatan Produksi Komoditas	1,30	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	2.796.206.500	2.780.455.279

		Peternakan Yang ASUH		Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.578.450.000	1.507.902.654
4	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Rata-Rata Konsumsi Energi Dan Protein Dalam Bahan Pangan Per Kapita	3,20	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	500.000.000	482.775.700
				-	-	-
5	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	4,00	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.530.500.000	2.416.934.337
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.765.500.000	1.662.609.137
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	250.000.000	244.150.000

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1. Capaian Kinerja Organisasi**

Pengukuran kinerja merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisa, dan menggunakan informasi untuk menentukan efisiensi dan efektivitas suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan program-programnya sesuai dengan Tupoksinya. Sebagai penjabaran lebih lanjut, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merumuskan Tujuan yaitu “Meningkatkan Peran Sektor Pertanian dan Perikanan dalam Perekonomian Daerah” dengan Sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Penyuluhan Pertanian
2. Meningkatnya produksi Tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan
3. Meningkatnya produksi komoditas peternakan yang ASUH
4. Meningkatnya Ketahanan Pangan
5. Meningkatnya Produksi Perikanan

##### **3.1.1. Indikator Capaian Kinerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Tahun 2024**

- a. Capaian Target dan Realisasi Tahun 2024

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama**

No	IKU DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Presentase Capaian IKU
				2024	2024	
1	Meningkatnya penyuluhan pertanian	Capaian Bina Kelompok Tani	%	54,88	80,32	146,36
2	Meningkatnya produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Persentase peningkatan produksi tanaman pangan	%	1,05	(1,02)	97,14
3	Meningkatnya produksi komoditas peternakan yang ASUH	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan yang ASUH	%	1,20	(0,71)	59,16
4	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	Persentase rata-rata ketersediaan energi dan protein dalam bahan pangan per kapita	%	3,10	2,37	76,45
5	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya + Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	%	3,00	2,72	90,66

5	Meningkatnya Produksi Perikanan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya + Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	%	2,00	2,25	102,50
---	---------------------------------------	---	---	------	------	--------

**Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu**

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			
				Target	Realisasi	% thdp Th. 2023	Pencapaian thdp Target
	<b>Urusan Pilihan Pertanian</b>						
<b>1</b>	<b>Produksi Tanaman Pangan</b>	<b>Ton</b>	<b>753.056</b>	<b>980.921</b>	<b>724.432</b>	<b>-3,80</b>	<b>73,85</b>
	<i>Produksi padi</i>	<i>Ton</i>	673.272	788.969	659.096	-2,11	83,54
	<i>Produksi palawija</i>	<i>Ton</i>	79.784	191.952	65.336	-18,11	34,04
	<b>Meningkatnya kualitas dan ketersediaan sumberdaya pertanian :</b>						
	Meningkatnya perluasan pertanian organik	Ha					
	Perluasan Irigasi Tersier;	Ha					
	<b>Pengembangan Alsin pra dan pasca panen :</b>	<b>Unit</b>	<b>214</b>	<b>66</b>	<b>424</b>		
	- Alsin Pra panen	Unit	210	39	415		
	- Alsin Pasca Panen	Unit	4	27	9		
	<b>Peningkatan Mutu Tanaman Pangan</b>	<b>Unit</b>	<b>1</b>	<b>4</b>			
	.- Sertifikasi Budidaya Tanaman Pangan		1	1			
	.- Sertifikasi Produk Tanaman Pangan			3			

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			
				Target	Realisasi	% thdp Th. 2023	Pencapaian thdp Target
	<b>Perluasan areal lahan pertanian (cetak sawah)</b>	Ha		0			
	<b>Pengembangan sumber sumber air</b>	<b>Unit</b>	<b>59</b>	<b>94</b>	<b>312</b>	<b>161,02</b>	<b>164,25</b>
	Embung		11	15	0		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi		18	34	27		
	Pembangunan/Perbaikan Damparit		0	11	11		
	Irigasi Perpipaan		0	6	224		
	Irigasi air tanah dangkal		3	16	8		
	Pengembangan jalan usahatani		26	10	39		
	Pengembangan jalan produksi		1	0	3		
	<b>Cakupan bina kelompok petani</b>	%	<b>80,32</b>	<b>55,82</b>			
	<i>Jumlah kelompok tani penerima manfaat</i>	<i>Kel.</i>	<i>1796</i>	<i>1281</i>	<i>2088</i>		
	<b>Meningkatnya tingkat kemampuan kelompok tani</b>	<i>Kel.</i>	<b>2.236</b>	<b>2580</b>			
	<i>Pemula</i>		<i>1.310</i>	<i>1480</i>			
	<i>Lanjut</i>		<i>786</i>	<i>956</i>			
	<i>Madya</i>		<i>136</i>	<i>138</i>			
	<i>Utama</i>		<i>4</i>	<i>4</i>			
<b>2</b>	<b>Produksi Hortikultura</b>		<b>269.968</b>	<b>196.030</b>	<b>267.341</b>	<b>-0,97</b>	<b>136,38</b>
<b>3</b>	<b>Produksi Komoditas Perkebunan</b>	<b>Ton</b>	<b>65.238</b>	<b>45.573</b>	<b>57.550</b>	<b>-11,78</b>	<b>126,28</b>
	<i>Pengembangan Unit Pengolah Outcome (UPH) Komoditas Perkebunan</i>	<i>Unit</i>	<i>3</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	<i>-33,33</i>	<i>100,00</i>
<b>4</b>	<b>Produksi Peternakan</b>	<b>Ton</b>	<b>80.226</b>	<b>69.108</b>	<b>75.387</b>	<b>-6,03</b>	<b>109,09</b>
	<i>Produksi daging</i>	<i>Ton</i>	<i>47.184</i>	<i>51.325</i>	<i>44.677</i>		
	<i>Produksi telur</i>	<i>Ton</i>	<i>29.062</i>	<i>14.038</i>	<i>27.125</i>		
	<i>Produksi susu</i>	<i>Ton</i>	<i>3.980</i>	<i>3.747</i>	<i>3.585</i>		
	<b>Jumlah Populasi Ternak</b>		<b>10.300.289</b>	<b>6.382.557</b>	<b>9.710.329</b>	<b>-5,73</b>	<b>152,14</b>
	<i>Populasi ternak ruminansia besar</i>	<i>Ekor</i>	<i>55.276</i>	<i>40.195</i>	<i>51.193</i>		

No	Indikator Capaian Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2023	Tahun 2024			
				Target	Realisasi	% thdp Th. 2023	Pencapaian thdp Target
	Populasi ternak ruminansia kecil	Ekor	552.033	285.258	512.912		
	Populasi Ternak Unggas	Ekor	9.692.980	6.057.104	9.146.224		
	<b>Jumlah Hewan Yang Sehat dan Produk Asala Hewan yang ASUH</b>		<b>20.288</b>	<b>4.591</b>	<b>20.288</b>	<b>0,00</b>	<b>441,91</b>
	Vaksinasi A1	Ekor	0	2.576	12.500		
	Vaksinasi rabies	Ekor	490	383	335		
	Eliminasi HPR	Ekor	0		0		
	Meningkatnya pelayanan pengobatan penyakit hewan	Ekor	19.468	651	41.761		
	Meningkatnya Pelayanan Kesmavet :			0	12		
	Pemeriksaan Hewan Qurban	Ekor	281	828	500		
	Persentase Fasilitasi Sertifikasi NKV	%		103			
	Fasilitasi NKV	Kali	7	1	4		
	Jumlah unit usaha peternakan	Unit	20	18	20		
	Monitoring dan Surveillance Residu Kimia dan cemaran mikroba produk asl peternakan	Ekor	22	31	0		
<b>5</b>	<b>Produksi Perikanan</b>	<b>Ton</b>	<b>83.748</b>	<b>85.206</b>		<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
	Perikanan Budidaya	Ton	82.466	83.336			
	Perikanan Tangkap	Ton	1.282	1.870			
<b>6</b>	<b>Pola Pangan Harapan (PPH)</b>	<b>Skor</b>	<b>93,4</b>	<b>77,41</b>	<b>88,45</b>	<b>-5,30</b>	<b>114,26</b>
	Rata-rata Peningkatan Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita	%	2,68	3,2	3,33		
	Rata-rata Peningkatan Konsumsi Energi dan Protein Perkapita	%	2,13	3,2	3,33		

### 3.1.2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis:

- 1) *Produksi Komoditas Tanaman Pangan* pada Tahun 2024 mencapai 724.432 ton atau tidak mencapai target (73,85%), sedangkan jika dibandingkan dengan Tahun 2022 lebih rendah yaitu (3,80%) penurunan produksi luas panen terjadi karena kekeringan panjang atau el nino dan serangan OPT (Organisme Pengganggu Tanaman) yang mengakibatkan luas tanam dan luas panen berkurang sehingga turun surat rekomendasi pengendalian OPT dari Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura. Penurunan terbesar terjadi pada komoditas kayu, kedelai, kacang tanah dan ubi jalar akibat kekeringan dan terbatasnya bantuan pemerintah pusat serta tidak ada bantuan pemerintah untuk komoditas kedelai, kacang tanah, ubi jalar dan ubi kayu.
- 2) *Produksi Komoditas Hortikultura* yaitu produksi sayuran, dan buah-buahan. Komoditas sayuran pada umumnya ditanam di lahan bukan sawah dalam bentuk hamparan dengan perlakuan teknologi yang sudah intensif. Untuk komoditas hortikultura produksi 267.341 ton pada Tahun 2024 atau naik sebesar 36,38% dari target.
- 3) *Produksi Komoditas Perkebunan*. Produksi komoditas perkebunan pada tahun 2024 mencapai 57.550,- ton (126,28%) dari target sebesar 45.573 ton. Pencapaian realisasi ini dikarenakan adanya kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan komoditas perkebunan serta penanaman, sehingga produktivitas meningkat. Disamping itu dtunjang dengan adanya pengendalian hama terpadu, pelatihan petani untuk meningkatkan SDM kelompok baik dalam hal kelembagaan maupun budidaya.
- 4) *Produksi Komoditas Peternakan* terdiri dari produksi daging, telur dan susu. Tahun 2024 produksi komoditas peternakan mengalami penurunan dibanding dengan Tahun 2023 (6,03%) maupun pencapaian terhadap target Tahun 2024 yaitu dari produksi 80.226 ton Tahun 2023 menjadi 75.387 ton pada Tahun 2024, penurunan tersebut dikarenakan adanya penurunan produksi daging dan produksi susu,

Produksi telur meningkat karena meningkatnya produksi ayam petelur, untuk populasi sapi potong masih adanya efek dari LSD dan PMK, populasi unggas pun meningkat karena kebutuhan masyarakat akan pemenuhan daging unggas yang lebih ekonomis dari pada ruminansia.

- 5) Produksi komoditas peternakan tidak terlepas Jumlah Hewan Yang Sehat dan Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, Halal atau ASUH, Vaksinasi AI, Rabies, Eliminasi HPR. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular (Vaksinasi AI, Vaksinasi rabies, Eliminasi HPR) tercapai melebihi target 129,94% dibandingkan tahun 2022, peningkatan pelayanan pengobatan penyakit hewan peningkatan pelayanan Kesmavet (pemeriksaan hewan kurban) dan fasilitasi penerbitan Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Ketidaktercapaian hal tersebut dikarenakan terbatasnya sarana dan prasarana, jumlah pegawai dan tersebarnya lokasi penyembelihan. Sedangkan untuk monitoring dan pengawasan residu kimia dan cemaran mikroba produk asal ternak menurun, hal ini dikarenakan tidak adanya atau sedikitnya aktif *service* dari tingkat Provinsi dan Balai Veteriner Subang dalam rangka monitoring residu kimia dan cemaran mikroba produk asal ternak ke pasar-pasar tradisional.
- 6) Kabupaten Tasikmalaya sejak dulu dikenal sebagai sentra produksi perikanan budidaya. Produksi ikan budidaya dari Kabupaten Tasikmalaya mencapai 83.748 ton pada tahun 2024, dimana produksi ikan nila menempati produksi terbesar di Jawa Barat bahkan di Indonesia.
- 7) Pada tahun 2023 Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Tasikmalaya mencapai 93,40 dari skor ideal 100. Pada tahun 2024 PPH Kabupaten Tasikmalaya ditargetkan meningkat menjadi 77,41. Realisasi perhitungan PPH tahun 2024 mencapai 88,45. Sehingga skor PPH sebagai indikator ketahanan pangan tahun 2024 dapat mencapai target (114,26). PPH tersebut dihitung berdasarkan kelompok pangan Padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah dan lain-lain.

### **3.1.3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya**

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja.

$$\text{EFEKTIFIVITAS} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja}}{\text{Target Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria efektivitas anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanjadikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanjadikatakan efektif.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanjadikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanjadikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60% maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif.

### **3.1.4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.**

Analisis Keberhasilan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja menggunakan analisis SWOT:

- a. ANALISIS INTERNAL (*STRENGTH AND WEAKNESESS* /KEKUATAN DAN KELEMAHAN)

<b>FAKTOR <i>STRENGTHS</i>/ KEKUATAN</b>	<b>FAKTOR <i>WEAKNESESS</i>/KELEMAHAN</b>
--	---

a. Memiliki kewenangan dengan Perbup Nomor 67 tahun 2016	a. Motivasi kerja aparatur belum optimal
b. Keberadaan kelembagaan pertanian UPT/UPTD	b. Database yang masih kurang baik.
c. Tersedianya aparatur pertanian	c. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia

### **Penjelasan Kekuatan**

- (1) Peraturan merupakan dasar yang kuat dalam kewenangan penyelesaian suatu instansi, maka dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 67 tahun 2016 menjadi dasar yang kuat dan payung hukum dalam penyelenggaraan suatu instansi.
- (2) Keberadaan kelembagaan pertanian seperti Unit Pelaksana Teknis Dinas seyogyanya menjadi kekuatan dalam membantu penyelenggaraan suatu instansi.
- (3) Tersedianya aparatur pertanian merupakan modal utama dalam pelaksanaan suatu penyelenggaraan instansi.

### **Penjelasan Kelemahan**

- (1) Motivasi kerja yang belum optimal didasari pada penempatan aparatur yang kurang sesuai dengan pendidikannya dapat menjadi pemicu kurangnya optimalisasi kinerja aparatur.
- (2) Database yang masih kurang baik, karena belum optimalnya koordinasi antar sektor pertanian.
- (3) Sarana dan prasarana pada kenyataannya untuk dinas pertanian belum terealisasi secara nyata : kantor dinas terpisah jauh dengan kawasan perkantoran, UPT wilayah belum memiliki kantor, terbatasnya sarana mobilitas dan

informasi sehingga menjadi kendala baik dalam koordinasi, kearsipan maupun aksesibilitas.

b. ANALISIS EKSTERNAL (*OPPORTUNITIES AND THREATS* /PELUANG DAN ANCAMAN)

FAKTOR <i>OPPORTUNITIES</i> / PELUANG	FAKTOR <i>THREATS</i> / ANCAMAN
<p>a. Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.</p> <p>b. Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang.</p> <p>c. Terbukanya pangsa pasar untuk komoditas pertanian</p>	<p>a. Adanya bencana alam (gempa, banjir, longsor dan gangguan OPT, penyakit ternak/hewan).</p> <p>b. Menurunnya minat masyarakat untuk usaha tani.</p>
<p>d. Adanya UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan berkelanjutan.</p>	<p>c. Adanya globalisasi pasar bebas</p> <p>d. Alih fungsi lahan pertanian tinggi</p>

**Penjelasan Peluang**

- (1) Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam, wilayah binaan yang terdiri dari 39 kecamatan dengan berbagai potensi unggulan komoditas baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
- (2) Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin meningkat, dengan indikasi penerapan adopsi inovasi teknologi pertanian oleh para petani yang salah

satunya Kabupaten Tasikmalaya sebagai penghasil dan sebagai eksportir beras organik di Jawa Barat dan penghasil manggis terbesar di Jawa Barat merupakan suatu peluang untuk lebih dikenal ke khalayak luas.

- (3) Pangsa pasar selalu terbuka mengikuti *trend* dan kebutuhan maka ini menjadi suatu peluang yang bisa dimanfaatkan.
- (4) UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang lahan berkelanjutan yang menjadi acuan penyusunan Perda tentang konversi lahan dan perlindungan lahan berkelanjutan.

### **Penjelasan Ancaman**

- (1) Adanya bencana alam (gempa, banjir, longsor dan gangguan OPT, penyakit ternak/hewan), Tasikmalaya merupakan daerah yang rawan bencana khususnya gempa dan tanah longsor menjadi suatu ancaman bagi wilayah-wilayah binaan Dinas Pertanian disamping gangguan OPT.
- (2) Menurunnya minat masyarakat terhadap usaha tani terutama generasi muda yang menganggap bahwa usaha pertanian kurang bergengsi selain itu petani di wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah masyarakat tani subsisten.
- (3) Pasar bebas dan globalisasi menjadi suatu ancaman bagi masyarakat yang belum siap mengikuti arus globalisasi.
- (4) Alih fungsi lahan pertanian tinggi akan menyebabkan lahan-lahan pertanian yang potensial semakin berkurang.

### **Penggambaran Matriks Analisis SWOT**

<p><b>INTERNAL</b></p> <p><b>EKTERNAL</b></p>	<p><b><u>Strenght</u></b></p> <p>a. Memiliki kewenangan dengan Perbup No.67 tahun 2016</p> <p>b. Keberadaan kelembagaan pertanian UPTD</p> <p>c. Tersedianya aparatur pertanian</p>	<p><b><u>Weaknesses</u></b></p> <p>a. Motivasi kerja aparatur belum optimal</p> <p>b. Database yang masih kurang baik.</p> <p>c. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran yang tersedia</p>
<p><b><u>Opportunities</u></b></p> <p>a. Memiliki wilayah yang luas dengan berbagai potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia.</p>	<p><b><u>Strategi SO</u></b></p> <p>a. Memanfaatkan peraturan daerah No.67 tahun 2016 dalam penggunaan sarana prasarana untuk mendukung pembangunan pertanian</p>	<p><b><u>Strategi WO</u></b></p> <p>a. Menciptakan konsep panduan mengenai kepemimpinan dan penciptaan tatanan kerja yang kondusif</p>

<p>b. Perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang semakin berkembang.</p> <p>c. Terbukanya pangsa pasar untuk komoditi pertanian</p> <p>d. Adanya UU No. 41 Tahun 2009 tentang lahan brkelanjutan.</p>	<p>b. Memanfaatkan keberadaan UPT untuk menginventarisir potensi wilayah yang yang belum tergal dengan baik.</p> <p>c. Mengoptimalkan keberadaan aparatur pertanian untuk melakukan pembinaan yang lebih intensif di wilayah binaannya khususnya di pedesaan</p> <p>d. Penyusunan Perda tentang lahan berkelanjutan</p>	<p>b. Membentuk struktur intern yang lebih solid serta penempatan aparatur yang profesional</p> <p>c. Memperbaiki dan melengkapi database supaya lebih <i>up to date</i></p> <p>d. Menyelenggarakan diklat teknis substantif pertanian</p> <p>e. Pembenahan dan pembangunan kantor-kantor UPT wilayah</p> <p>f. Pemutakhiran data lahan pertanian yang potensial untuk dijadikan lahan berkelanjutan</p>
<p><b>Threats</b></p> <p>a. Adanya bencana alam (gempa, banjir, longsor dan gangguan OPT, penyakit ternak/hewan).</p> <p>b. Menurunnya minat masyarakat untuk usaha tani.</p>	<p><b>Strategi ST</b></p> <p>a. Memasyarakatkan usahatani konservasi yang berwawasan lingkungan</p> <p>b. Mengoptimalkan keberadaan kelembagaan sesuai dengan payung hukum yang ada</p> <p>c. Memberdayakan keberadaan UPT untuk menginventarisir daerah-</p>	<p><b>Strategi WT</b></p>

c. Adanya globalisasi pasar bebas	daerah yang berpotensi rawan bencana	
d. Alih fungsi lahan pertanian tinggi	d. Mengoptimalkan keberadaan aparatur pertanian untuk meningkatkan minat masyarakat melalui penyuluhan dan penerapan usahatani berwawasan agribisnis  e. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait melalui pendekatan RTRW	

### 3.1.5. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2024, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan didukung oleh Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.

Alokasi Belanja Tidak Langsung dengan pagu sebesar Rp. 31.207.021.756,- dengan realisasi sebesar Rp. 30.895.775.554,- (99,00%). Belanja tidak langsung dialokasikan untuk Belanja Pegawai (Gaji Pokok, Tunjangan Struktural/Fungsional, Tunjangan Keluarga, TPP dan insentif.

Belanja Langsung mempunyai pagu anggaran sebesar Rp. 41.404.849.811, -dan telah terserap sebesar Rp. 37.340.925.190,- (90,18%).

Adapun rincian belanja langsung urusan pertanian, ketahanan pangan dan kelautan perikanan yaitu sebagai berikut :

**Tabel. 3.1.5 LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

NO	URAIAN (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Paket)			PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	%	% FISIK	KET.
				SUMBER DANA	SUMBER DANA			
				TOTAL	TOTAL			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>				<b>500.000.000</b>	<b>482.775.700</b>			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>				<b>500.000.000</b>	<b>482.775.700</b>			
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>				<b>500.000.000</b>	<b>482.775.700</b>	<b>96,56</b>	<b>100,00</b>	
Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				500.000.000	482.775.700	96,56	100,00	
1	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	38 Ton	500.000.000	482.775.700	96,56	100,00	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>				<b>72.111.871.567</b>	<b>67.753.925.044</b>			
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>				<b>2.530.500.000</b>	<b>2.416.934.337</b>	<b>95,51</b>	<b>90,00</b>	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>				<b>515.000.000</b>	<b>510.175.200</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				250.000.000	245.175.200			
2	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	36 pcs Jaring	250.000.000	245.175.200	98,07	100,00	
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				265.000.000	265.000.000	100,00	100,00	
3	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	2 Kelompok	265.000.000	265.000.000	100,00	100,00	
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>				<b>1.765.500.000</b>	<b>1.662.609.137</b>	<b>94,17</b>	<b>100,00</b>	
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				1.765.500.000	1.662.609.137	94,17	100,00	
4	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20 Unit	-	-	0,00	0,00	
5	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 Unit	1.765.500.000	1.662.609.137	94,17	100,00	
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>				<b>250.000.000</b>	<b>244.150.000</b>	<b>97,66</b>	<b>100,00</b>	
Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				250.000.000	244.150.000	97,66	100,00	

6	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Ton	250.000.000	244.150.000	97,66	100,00	
<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN</b>				<b>69.581.371.567</b>	<b>65.336.990.707</b>			
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>				<b>4.037.789.153</b>	<b>3.948.527.026</b>	<b>97,79</b>	<b>39,00</b>	
<b>Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>				<b>1.241.582.653</b>	<b>1.168.071.747</b>	<b>94,08</b>	<b>33,00</b>	
7	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	39 Kelompok	1.091.582.653	1.018.071.747	93,27	100,00	
8	Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	1 Ton	150.000.000	150.000.000	100,00	100,00	
<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>				<b>2.796.206.500</b>	<b>2.780.455.279</b>	<b>199,43</b>	<b>200,00</b>	
9	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	6 Ton	25.000.000	24.999.600	100,00	100,00	
10	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5044 Ekor	2.771.206.500	2.755.455.679	99,43	100,00	
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>				<b>28.604.976.658</b>	<b>25.006.988.807</b>	<b>87,41</b>	<b>16,00</b>	
<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>				<b>28.579.976.658</b>	<b>24.981.988.807</b>	<b>87,41</b>	<b>16,00</b>	
11	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	8.250.889.000	8.089.207.848	98,04	100,00	
12	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit	840.000.000	839.999.500	100,00	100,00	
13	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	3 Unit	157.500.000	125.700.000	79,81	100,00	
14	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	15 Unit	11.911.587.658	11.706.298.905	98,28	100,00	
15	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	60 Unit	5.370.000.000	2.206.559.150	41,09	50,00	
16	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	3 Unit	2.050.000.000	2.014.223.404	98,25	100,00	
<b>Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>				<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
17	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	10 Laporan	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>				<b>1.578.450.000</b>	<b>1.507.902.654</b>	<b>95,53</b>	<b>60,00</b>	
<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>25.000.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	

18	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	12 Laporan	25.000.000	25.000.000	100,00	100,00	
<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>164.800.000</b>	<b>164.800.000</b>	<b>100,00</b>	<b>72,00</b>	
19	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	12 Laporan	164.800.000	164.800.000	100,00	100,00	
<b>Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>				<b>1.338.650.000</b>	<b>1.268.102.654</b>	<b>94,73</b>	<b>54,00</b>	
20	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	12 Laporan	159.600.000	157.875.688	98,92	100,00	
21	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	12 Laporan	1.179.050.000	1.110.226.966	94,16	100,00	
<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>				<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	
22	Pengawasan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	15 Unit Usaha	50.000.000	50.000.000	100,00	100,00	
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>				<b>3.953.134.000</b>	<b>3.784.389.766</b>	<b>95,73</b>	<b>70,00</b>	
<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>				<b>3.953.134.000</b>	<b>3.784.389.766</b>	<b>95,73</b>	<b>70,00</b>	
23	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	39 Unit	1.863.934.000	1.834.227.250	98,41	100,00	
24	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	39 Unit	2.089.200.000	1.950.162.516	93,34	100,00	
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>				<b>200.000.000</b>	<b>193.406.900</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	
<b>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>				<b>200.000.000</b>	<b>193.406.900</b>	<b>97</b>	<b>100</b>	
25	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	39 kec	200.000.000	193.406.900	96,70	100,00	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				<b>31.207.021.756</b>	<b>30.895.775.554</b>	<b>99,00</b>	<b>66,00</b>	
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				<b>314.955.000</b>	<b>314.173.909</b>	<b>199,53</b>	<b>200,00</b>	
26	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	189.955.000	189.377.087	99,70	100,00	
27	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan	125.000.000	124.796.822	99,84	100,00	

	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>27.793.339.468</b>	<b>27.526.057.674</b>	<b>99,04</b>	<b>91,00</b>	
28	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Tahun	27.793.339.468	27.526.057.674	99,04	100,00	
	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			-	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
29	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	-	-	0,00	0,00	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>632.297.088</b>	<b>631.577.252</b>	<b>99,89</b>	<b>70,00</b>	
30	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	48.389.600	48.339.000	99,90	100,00	
31	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	95.015.400	94.969.700	99,95	100,00	
32	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	30.000.000	29.950.000	99,83	100,00	
33	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	99.142.088	99.094.600	99,95	100,00	
34	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	125.000.000	124.650.000	99,72	100,00	
35	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	234.750.000	234.573.952	99,93	100,00	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>59.075.000</b>	<b>56.209.000</b>	<b>194,91</b>	<b>200,00</b>	
36	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	5.000.000	4.884.000	100,00	100,00	
37	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit	54.075.000	51.325.000	94,91	100,00	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>1.986.747.000</b>	<b>1.954.317.619</b>	<b>98,37</b>	<b>88,00</b>	
38	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	296.691.000	275.564.619	92,88	100,00	
39	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1.690.056.000	1.678.753.000	99,33	100,00	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>420.608.200</b>	<b>413.440.100</b>	<b>188,17</b>	<b>82,00</b>	
40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	364.608.200	363.967.100	99,82	100,00	

41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	56.000.000	49.473.000	88,34	100,00	
				<b>72.611.871.567</b>	<b>68.236.700.744</b>	93,97	95,00	

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Tinjauan Umum**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencapaian visi dan misi pemerintah daerah serta sasaran selama Tahun Anggaran 2024. Dengan berdasarkan pada LKIP Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan TA. 2024 diperoleh capaian akhir kinerja pencapaian sasaran Dinas Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Indikator kinerja secara umum dapat tercapai sebagaimana ditargetkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.
2. Pembangunan bidang pertanian di Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2024 terfokus pada Pembangunan Pertanian Berkelanjutan melalui Peningkatan Produksi Pertanian (Hasil olahan komoditas pertanian, produksi tanaman pangan, produksi hortikultura, produksi perkebunan dan produksi hasil peternakan), serta Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan yang didukung melalui Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian.

#### **4.2. Permasalahan dan Solusi**

##### **4.2.1. Permasalahan yang dihadapi Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan antara lain:**

1. Banyaknya masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari kegiatan pertanian tetapi tidak mempunyai lahan serta menurunnya produktivitas lahan sebagai dampak praktek

pertanian tidak berkelanjutan yang menjadi pemicu tingginya alih fungsi lahan.

2. Teknik budi daya kurang presisi yang dimaksud di sini adalah bertani dengan teknik yang benar dan tepat guna. Di lapangan, pertanian dilakukan berdasarkan naluri dan pengalaman. Jarang sekali petani di Indonesia yang berasal dari kalangan terdidik yang sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup tentang pertanian.
3. Krisis regenerasi petani muda Rendahnya minat regenerasi muda untuk terjun ke dunia pertanian terlihat dari statistik sebesar 61% petani berusia >45 tahun. Padahal, generasi muda adalah generasi penerus sekaligus kunci keberhasilan sektor pertanian.
4. Belum terfokusnya atau tersentralisasinya pengembangan komoditas pertanian khususnya komoditas unggulan.
5. Ketersediaan infrastruktur dan sarana pertanian belum begitu memadai yang diakibatkan oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memelihara infrastruktur dan sarana pertanian
6. Kekurangan modal yang dihadapi petani menjadi isu klasik karena memang sifat usaha bidang pertanian belum mendapat dukungan yang penuh dari pihak perbankan.
7. Belum adanya konsep wawasan pertanian terpadu (*integrated farming system*) dalam membangun pertanian dalam arti luas (tanaman pangan, peternakan, perkebunan,) serta dukungan dari perindustrian guna mencapai sistem agribisnis.
8. Perubahan iklim menjadi kendala yang serius karena iklim menjadi tidak menentu dan susah diprediksi.
9. Belum sampainya informasi harga pasar komoditas pertanian yang transparan kepada petani dan juga harga yang selalu fluktuatif

serta ketergantungan kepada tengkulak dan pedagang besar yang sering merugikan petani.

10. Masih lemahnya penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang ditandai antara lain dengan penggunaan pupuk dan bahan kimia anorganik yang berlebihan serta perkembangan teknologi seringkali menyebabkan tergerusnya kearifan lokal dan potensi sumberdaya local.
11. Tingkat kesadaran petani terhadap usaha bidang pertanian itu sendiri, yaitu di satu sisi petani menggantungkan hidupnya pada usaha tani tetapi disatu sisi sebagian besar petani tidak bersungguh-sungguh dalam usaha taninya karena hanya dianggap sebagai tradisi saja (subsisten).

#### **4.2.2. Solusi untuk mengatasi permasalahan diatas adalah:**

1. Memberlakukan Perda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan membuat perluasan areal pertanian.
2. Pemerintah melalui kelembagaan pertanian melengkapi pengetahuan masyarakat tani dengan menurunkan penyuluh pertanian.
3. Program petani milenial dan program yess yang mendukung generasi muda dalam bidang pertanian.
4. Mengusulkan pembangunan infrastruktur pertanian seperti kantor UPTD Wilayah dan BPP serta Rehabilitasi Bangunan BPP yang rusak melalui APBD Kabupaten maupun DAK.
5. Melaksanakan pelatihan yang menunjang kualitas pegawai, petani dan kelembagaan pertanian.
6. Memberikan fasilitasi kepada petani untuk memperoleh permodalan

7. Mengoptimalkan koordinasi instansi terkait dalam menunjang pembangunan sektor pertanian.
8. Melaksanakan penataan pola produksi baik jadwal tanam, luas tanam maupun jenis komoditas yang diusahakan, disesuaikan dengan permintaan pasar.
9. Mengoptimalkan komoditas unggulan untuk mempunyai nilai tambah
10. Keberlanjutan pengembangan pertanian ramah lingkungan go organic.
11. Menata dan menumbuhkan kelembagaan petani khususnya kelompok tani dan gapoktan di bidang organisasi, administrasi dan di bidang usaha.